



Dugaan Suap Proyek Saluran Air Hujan di Yogyakarta Siapapun yang Terlibat Harus Diproses Hukum

YOGYA, TRIBUN - Koordinator Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus dugaan

suap proyek saluran air hujan (SAH) Jalan Prof. Dr. Soepomo Yogyakarta.

Pernyataan tersebut menyusul diamankannya uang tunai Rp130 juta di rumah ALN, Kepala Bidang

Sumber Daya Air, Dinas PUPKP Kota Yogyakarta.

ALN adalah satu di antara dua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Yogyakarta yang sempat diamankan KPK da-

lam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di Yogyakarta dan Solo, baru-baru ini.

Selain ALN, ada BAS selaku

• ke halaman 7

Siapapun yang Terlibat Harus

• Sambungan Hal 1

anggota Badan Layanan Pengadaan (BLP) sekaligus anggota Pokja Lelang Pengadaan Rehabilitasi SAH Jalan Prof. Dr. Soepomo.

Dalam penggeledahan, Rabu (21/8), KPK mengamankan uang Rp130 juta di rumah ALN. KPK terus mengembangkan kasus tersebut. Selanjutnya, pada Kamis (22/8), KPK mendatangi Balai Kota Yogyakarta memeriksa beberapa berkas dan dokumen di ruang kerja ALN, kantor DPUPKP dan kantor BLP yakni ruang kerja BAS.

Hingga berita ini diturunkan, dua ASN Pemkot Yogyakarta tersebut statusnya masih saksi.

"Siapapun yang terlibat dalam kasus ini harus di proses hukum tanpa tebang pilih," kata Kamba, Sabtu (24/8).

Di sisi lain, Kamba meminta Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, tidak memberikan bantuan hukum apabila nantinya ada ASN yang terlibat dugaan suap proyek SAH tersebut.

Yang perlu dipertimbang-

kan adalah aspek kecemburuan pada ASN di Pemkot Yogyakarta, khususnya yang pernah tersandung korupsi.

"Dulu ada kasus korupsi yang menyeret mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Tidak ada bantuan hukum yang diberikan. Apabila nanti di kasus dugaan suap proyek SAH ternyata ada ASN yang terlibat diberikan bantuan hukum, tentu akan ada kecemburuan," katanya.

Untuk memberikan bantuan hukum, kata dia, membutuhkan dana. Sebab, perlu menyewa kuasa hukum profesional. Ia menilai hal itu dapat memberatkan anggaran Pemkot Yogyakarta.

"Pasti butuh anggaran besar. Daripada untuk memberikan bantuan hukum, mendingan dana tersebut untuk memperkuat sistem pengawasan. Jika bantuan hukum terbentur aturan hukum yang ada, ya harusnya Pemkot tegas saja, tidak memberikan bantuan hukum," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, pada rangkaian OTT dugaan suap proyek SAH Jalan Prof. Dr. Soepomo, KPK mengamankan 5 orang. Selain dua ASN Pemkot Yogyakarta, KPK mengamankan GYA,

Direktur Utama PT. Manira Arta Mandiri (Matarani); NVA, Direktur PT. Manira Arta Mandiri; ESF, jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, anggota TP4D.

KPK pun sudah menetapkan tiga tersangka. Antara lain, GYA, ESF (jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, anggota TP4D), dan SSL (jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta). GYA selaku pemberi suap, sedangkan ESF dan SSL selaku penerima suap.

Dugaan uang suap yang sudah diserahkan kepada ESF dan SSL sekitar Rp221 juta, atau sekitar 3 persen dari 5 persen kesepakatan komitmen *fee*. Ratusan juta rupiah tersebut diberikan dalam tiga tahap, yakni pada 16 April 2019 diberikan sebesar Rp10 juta. Pada 15 Juni 2019, sebesar Rp100.870.000. Pada 19 Agustus 2019 sebesar Rp110.870.000. Sedangkan sisa *fee* 2 persen, direncanakan akan diberikan setelah pencairan uang muka pada minggu keempat Agustus 2019.

Sebelumnya, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Fakultas Hukum, UGM, Zaenur Rohman, mengatakan, KPK harus mengembangkan dan menuntaskan kasus dugaan suap proyek

SAH di Yogyakarta.

Terkait kasus tersebut yang melibatkan oknum jaksa di TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah), Pukat mendukung kejaksaan RI melakukan reformasi. Kejaksaan perlu mengadopsi pemberian sanksi pencopotan pimpinan yang anak buahnya melakukan tindak pidana korupsi.

Selain itu, Presiden Joko Widodo perlu mengevaluasi keberadaan TP4P (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Pusat) dan TP4D, yang tidak tepat dijadikan pengawal proyek pembangunan. "Operasi Tangkap Tangan KPK terhadap ESF, oknum jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, menunjukkan institusi kejaksaan masih belum bersih dari korupsi," katanya.

Menurutnya, kejadian OTT jaksa dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum maupun terhadap hukum secara umum.

Dugaan korupsi yang melibatkan oknum TP4D merupakan ironi, karena tugasnya adalah untuk mencegah penyimpangan dalam pembangunan. (maw)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			
3. Forpi			
4. Dinas PUPKP			
5. Bagian Layanan Pengadaan			

Yogyakarta, 26 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005